



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Integrasi Konsep *Green Economy* dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029: Analisis Dokumen

*Analysis of the Integration of Green Economy Concepts in the Banyumas Regency Medium-Term Development Plan (RPJMD) for 2025-2029:
A Document Analysis*

Selvi Regita Cahyani¹, Humaira Rasyida Sahharani², Naerul Edwin Kiky Aprianto³

¹ Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
selviregita.2006@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
hum.rasyida@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
naerul.edwin@uinsaizu.ac.id

***Corresponding Author: E-mail: selviregita.2006@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Apr, 2026

Revised: 11 Jun, 2026

Accepted: 25 Jun, 2026

Kata Kunci:

*Green Economy, Integrasi
Kebijakan, Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Pembangunan Berkelanjutan,
RPJMD*

Keywords:

*Green Economy, Policy
Integration, Regional Development
Planning, Sustainable
Development, Rpjmd*

DOI: 10.56338/jks.v9i6.11454

ABSTRAK

Transisi menuju pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi prinsip lingkungan dalam dokumen perencanaan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi konsep *Green Economy* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan berbasis dokumen dan analisis isi kualitatif untuk menilai integrasi pada dimensi normatif, strategis, dan operasional kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ekonomi hijau telah terintegrasi secara bertahap dalam RPJMD, tercermin dalam visi pembangunan yang berorientasi keberlanjutan, diterjemahkan dalam strategi kebijakan lingkungan, serta dioperasionalkan melalui program dan indikator kinerja lingkungan. Namun demikian, integrasi tersebut masih bersifat parsial karena belum sepenuhnya menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan secara lintas sektor. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis struktural dokumen perencanaan dapat digunakan untuk menilai kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsi kerangka ekonomi hijau.

ABSTRACT

The transition toward sustainable development requires the integration of environmental principles into regional planning documents. This study aims to analyze the integration of the Green Economy concept within the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Banyumas

Regency for the period 2025–2029. The research employs a qualitative approach using document-based policy analysis and qualitative content analysis to examine the normative, strategic, and operational dimensions of policy integration. The findings indicate that Green Economy principles have been incorporated gradually within the RPJMD. Sustainability values are reflected at the normative level through development vision, translated into environmental-oriented strategies at the strategic level, and operationalized through programs and environmental performance indicators. However, the integration remains partial, as cross-sectoral linkage between economic growth and environmental sustainability is not yet fully systemic. This study contributes to the evaluation of regional development planning by demonstrating that structural document analysis can be used to assess the readiness of local governments in transitioning toward a Green Economy framework.

PENDAHULUAN

Transformasi pembangunan menuju arah yang berkelanjutan menjadi agenda utama dalam kebijakan publik global dan nasional sebagai respons terhadap degradasi lingkungan, perubahan iklim, serta ketimpangan sosial-ekonomi. Konsep *Green Economy* berkembang sebagai pendekatan pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusivitas sosial dalam kerangka keberlanjutan (OECD, 2019; Xu et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, ekonomi hijau dipandang sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus menjaga daya dukung lingkungan (Kristianto, 2020; Anwar, 2022). Implementasi prinsip tersebut pada tingkat daerah sangat ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai instrumen strategis kebijakan lima tahunan. Penelitian tentang ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pendekatan. Pertama, studi yang menekankan peran ekonomi hijau sebagai strategi makro pembangunan nasional dan regional (Ammar et al., 2024; Xu et al., 2022). Kedua, penelitian yang mengkaji implementasi ekonomi hijau pada level kebijakan sektoral maupun proyek pembangunan tertentu (Antasari, 2019; Yenita & Soegiarso, 2024). Ketiga, kajian yang menilai perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka ekonomi hijau dan keberlanjutan (Aryani & Nugroho, 2024; Mubarok, 2023). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan publik sering kali telah diakui secara normatif dan strategis, namun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi implementasi dan pengukuran capaian keberlanjutan (Chaaben et al., 2022).

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas ekonomi hijau dari perspektif strategi pembangunan dan implementasi kebijakan, kajian yang secara khusus menganalisis integrasi konsep *Green Economy* dalam keseluruhan struktur dokumen RPJMD pada level kabupaten masih relatif terbatas. Beberapa peneliti fokus pada implementasi program atau proyek pembangunan tertentu, sementara kajian terhadap konsistensi antara visi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja dalam dokumen RPJMD belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis struktural dokumen RPJMD sebagai instrumen kebijakan daerah untuk menilai tingkat integrasi konsep *Green Economy*

pada level normatif, strategis, dan operasional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa evaluasi sistematis terhadap integrasi ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat integrasi konsep *Green Economy* dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Green Economy* dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan

Konsep *Green Economy* berkembang sebagai respons terhadap model pembangunan konvensional yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dipahami sebagai sistem ekonomi yang mendorong efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan ekosistem tanpa menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat (OECD, 2019). Dengan demikian, *Green Economy* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen lingkungan, tetapi juga sebagai strategi transformasi ekonomi jangka panjang.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau berkontribusi terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pembangunan apabila didukung kebijakan publik yang konsisten (Xu et al., 2022). Di Indonesia, pendekatan *Green Economy* dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui integrasi aspek ekologis dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah (Kristianto, 2020; Anwar, 2022). Perspektif ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan lingkungan, melainkan harus disinergikan dalam kerangka kebijakan yang terpadu.

Dengan demikian, *Green Economy* dalam penelitian ini dipahami sebagai integrasi prinsip keberlanjutan ekologis dalam struktur kebijakan pembangunan, khususnya pada tingkat perencanaan daerah.

Integrasi Kebijakan Lingkungan dalam Tata Kelola Daerah

Integrasi kebijakan (*policy integration*) merupakan konsep dalam studi kebijakan publik yang menekankan pentingnya konsistensi antara tujuan, strategi, dan instrumen pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, integrasi kebijakan lingkungan menjadi indikator utama keberhasilan transformasi menuju ekonomi hijau.

Ammar et al. (2024) menegaskan bahwa strategi ekonomi hijau pada tingkat nasional memerlukan harmonisasi lintas sektor agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Chaaben et al. (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi hijau bergantung pada konsistensi antara kebijakan makro, regulasi sektoral, dan instrumen evaluasi pembangunan.

Pada level daerah, integrasi kebijakan menjadi semakin kompleks karena melibatkan hubungan antara visi kepala daerah, dokumen perencanaan, dan implementasi program. Aryani dan Nugroho (2024) menunjukkan bahwa perencanaan daerah yang mengusung ekonomi hijau memerlukan penyelarasan antara strategi pembangunan dan indikator kinerja yang dapat mengukur capaian keberlanjutan secara konkret. Tanpa indikator yang terukur, integrasi kebijakan cenderung berhenti pada tataran normatif.

Berdasarkan kajian tersebut, integrasi kebijakan dalam penelitian ini dipahami sebagai keterkaitan sistematis antara visi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja yang mencerminkan prinsip *Green Economy*.

RPJMD sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Daerah

RPJMD merupakan dokumen kebijakan utama yang mengarahkan pembangunan daerah selama lima tahun. Dokumen ini memuat visi pembangunan, misi daerah, arah kebijakan, serta indikator kinerja yang menjadi dasar evaluasi pembangunan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa RPJMD memiliki peran strategis dalam menginternalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah (Mubarok, 2023; Antasari, 2019). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih menekankan pada implementasi program atau dampak kebijakan sektoral, bukan pada analisis struktural dokumen secara menyeluruh.

Kajian mengenai proyek pembangunan berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur hijau dan konstruksi berkelanjutan, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh konsistensi dokumen perencanaan awal (Yenita & Soegiarso, 2024). Hal ini menegaskan pentingnya menilai dokumen RPJMD sebagai fondasi kebijakan sebelum implementasi dilakukan.

Dengan demikian, RPJMD dalam penelitian ini diposisikan sebagai objek analisis kebijakan untuk menilai sejauh mana prinsip *Green Economy* telah terintegrasi dalam struktur perencanaan pembangunan daerah.

Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan sintesis teori dan temuan penelitian terdahulu, integrasi *Green Economy* dalam RPJMD dipahami dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi normatif, dimensi strategis, dan dimensi operasional. Dimensi normatif merefleksikan integrasi prinsip *Green Economy* dalam visi pembangunan daerah sebagai landasan arah kebijakan. Dimensi strategis menunjukkan bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam misi serta arah kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, dimensi operasional menggambarkan implementasi prinsip *Green Economy* melalui program prioritas dan indikator kinerja pembangunan yang terukur.

Kerangka pikir penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa tingkat integrasi kebijakan ditentukan oleh konsistensi dan keterkaitan antar ketiga dimensi tersebut. Integrasi yang kuat tercermin apabila prinsip *Green Economy* hadir secara selaras mulai dari tingkat visi hingga instrumen operasional pembangunan. Sebaliknya, apabila prinsip tersebut hanya muncul pada salah satu dimensi tanpa dukungan mekanisme operasional yang jelas, maka integrasi kebijakan dapat dikategorikan masih bersifat parsial.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan berbasis studi dokumen (*document-based policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis integrasi konsep *Green Economy* dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga fokus analisis terletak pada interpretasi isi kebijakan, struktur perencanaan, serta konsistensi antar komponen kebijakan yang tertuang dalam dokumen resmi. Penelitian bersifat evaluatif-analitis, yakni menilai tingkat integrasi

konsep *Green Economy* dalam RPJMD tanpa melakukan penilaian normatif terhadap aktor kebijakan.

Populasi penelitian mencakup dokumen perencanaan pembangunan daerah yang relevan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yang memuat visi pembangunan, misi daerah, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja pembangunan. Dokumen tersebut dipilih karena memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman pembangunan lima tahunan pemerintah daerah sekaligus instrumen utama integrasi kebijakan lintas sektor.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data secara sengaja berdasarkan relevansi terhadap tujuan penelitian. RPJMD dipilih sebagai sampel utama karena secara substansial mencerminkan keseluruhan arah pembangunan daerah dan memungkinkan analisis integrasi konsep *Green Economy* dilakukan secara komprehensif pada tingkat normatif, strategis, dan operasional.

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia sehingga tidak memerlukan persetujuan komite etik penelitian. Meskipun demikian, prinsip etika akademik tetap dijaga melalui penggunaan dokumen resmi yang memiliki legitimasi kelembagaan serta pencantuman sumber secara akurat. Validitas penelitian dijaga melalui konsistensi antara kerangka teoritis dan parameter analisis yang digunakan, sedangkan kepercayaan data (*trustworthiness*) diperkuat melalui pembacaan berulang dokumen, pencatatan proses analisis (*audit trail*), serta penggunaan kategori analisis yang terdefinisi secara jelas sehingga proses penelitian dapat ditelusuri secara konseptual.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen resmi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagai objek utama analisis kebijakan. Dokumen ini dianalisis untuk mengidentifikasi integrasi prinsip *Green Economy* pada tingkat visi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja. Data sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan dengan konsep *Green Economy*, pembangunan berkelanjutan, dan integrasi kebijakan publik. Data sekunder digunakan sebagai landasan teoritis sekaligus pembanding dalam proses interpretasi temuan penelitian. Penggunaan kedua jenis data tersebut dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa analisis memiliki dasar konseptual yang kuat serta tetap berbasis pada dokumen kebijakan aktual.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi dokumen RPJMD sebagai sumber utama penelitian, melakukan pembacaan menyeluruh terhadap isi dokumen, menandai bagian yang berkaitan dengan prinsip *Green Economy*, serta mengelompokkan temuan berdasarkan kategori analisis yang telah ditentukan. Studi dokumentasi dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan tertulis, sehingga teknik observasi atau wawancara tidak digunakan. Seluruh data diperoleh dari dokumen resmi yang telah dipublikasikan secara sah oleh pemerintah daerah.

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Data yang diperoleh dari dokumen RPJMD dianalisis berdasarkan parameter yang dirumuskan dalam kerangka teoritis penelitian. Proses analisis mencakup penyaringan bagian

dokumen yang relevan dengan dimensi *Green Economy*, pengelompokan temuan ke dalam tiga dimensi integrasi normatif, strategis, dan operasional serta interpretasi terhadap konsistensi antara visi, arah kebijakan, program, dan indikator pembangunan dalam mencerminkan prinsip ekonomi hijau. Tahap akhir analisis dilakukan melalui penarikan kesimpulan mengenai tingkat integrasi kebijakan berdasarkan keselarasan antar dimensi tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini tidak dilakukan pengujian hipotesis statistik karena analisis difokuskan pada interpretasi mendalam terhadap isi dokumen kebijakan sesuai dengan kerangka konseptual yang telah dirumuskan.

Tabel 1. Kerangka Analisis Integrasi Konsep *Green Economy* dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Dimensi Integrasi	Indikator Analisis	Temuan dalam RPJMD	Interpretasi <i>Green Economy</i>
Normatif	Visi pembangunan daerah	Visi pembangunan memuat orientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.	Menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan telah menjadi nilai dasar pembangunan daerah. Integrasi <i>Green Economy</i> hadir pada tingkat konseptual melalui pengakuan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Normatif	Orientasi pembangunan jangka menengah	Dokumen menempatkan kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu arah pembangunan daerah.	Mengindikasikan adanya internalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi kebijakan. Namun, konsep <i>Green Economy</i> belum dirumuskan secara eksplisit sebagai paradigma pembangunan daerah.

Strategis	Misi pembangunan daerah	Terdapat misi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas ekologi, dan tata kelola sumber daya alam.	Prinsip keberlanjutan telah diterjemahkan ke dalam kerangka strategis pembangunan sehingga tidak berhenti pada level visi. Integrasi mulai bergerak dari komitmen normatif menuju arah kebijakan yang lebih konkret.
Strategis	Arah kebijakan pembangunan	Kebijakan lingkungan diarahkan pada pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Menunjukkan adanya penerjemahan prinsip <i>Green Economy</i> dalam kebijakan sektoral. Namun integrasi masih dominan pada sektor lingkungan dan belum sepenuhnya terhubung dengan kebijakan ekonomi, investasi, dan pengembangan wilayah.
Operasional	Program prioritas pembangunan	Terdapat program pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan persampahan.	Menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan telah diimplementasikan ke dalam program pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.
Operasional	Indikator kinerja pembangunan	Terdapat indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan indikator lingkungan lainnya.	Integrasi keberlanjutan telah masuk dalam sistem evaluasi pembangunan daerah. Namun indikator ekonomi hijau seperti efisiensi energi, ekonomi sirkular, produktivitas sumber daya, dan pengurangan emisi belum terlihat secara jelas.
Lintas Dimensi	Konsistensi visi-strategi-program	Prinsip keberlanjutan muncul pada seluruh tingkatan dokumen mulai dari visi, strategi, hingga program pembangunan.	Menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan antardimensi. Meskipun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan belum dirumuskan secara sistematis dalam seluruh sektor pembangunan.

Tingkat Integrasi	Evaluasi keseluruhan dokumen	Prinsip <i>Green Economy</i> hadir pada dimensi normatif, strategis, dan operasional, tetapi belum terintegrasi secara menyeluruh lintas sektor.	Integrasi dapat dikategorikan sebagai parsial-progresif , yaitu kondisi ketika prinsip ekonomi hijau telah diinstitusionalisasikan dalam dokumen perencanaan namun belum membentuk kerangka pembangunan hijau yang sepenuhnya terpadu.
-------------------	------------------------------	--	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Konsep *Green Economy* pada Dimensi Normatif (Visi Pembangunan)

Hasil analisis terhadap rumusan visi dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kualitas ekologi wilayah. Narasi visi tersebut memuat orientasi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan sebagai prinsip dasar pembangunan jangka menengah. Secara tekstual, dokumen RPJMD menggunakan terminologi pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Meskipun istilah *Green Economy* tidak disebutkan secara eksplisit, substansi konsepnya hadir melalui penekanan pada keberlanjutan ekologis sebagai arah normatif pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menetapkan visi pembangunan daerah yaitu “*Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera*” yang diselaraskan dengan visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 yaitu “*Banyumas HEBAT (Harmoni Berkelanjutan, Berdaya Saing Maju, Mandiri Berbudaya Sejahtera)*”. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan telah menjadi bagian dari arah pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.

Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi hijau pada tingkat visi telah hadir sebagai nilai dasar kebijakan, namun masih bersifat konseptual dan belum diformulasikan sebagai kerangka ekonomi pembangunan yang operasional. Dalam literatur kebijakan publik, integrasi pada tingkat normatif dipahami sebagai tahap awal transformasi menuju pembangunan berkelanjutan karena visi berfungsi sebagai legitimasi arah kebijakan jangka panjang (OECD, 2019). Kehadiran prinsip keberlanjutan dalam visi RPJMD Banyumas mencerminkan internalisasi nilai lingkungan dalam orientasi pembangunan daerah. Temuan ini konsisten dengan Ammar et al. (2024) dan Kristianto (2020) yang menunjukkan bahwa ekonomi hijau dalam konteks kebijakan daerah sering muncul terlebih dahulu sebagai prinsip konseptual sebelum berkembang menjadi kebijakan terukur. Namun demikian, absennya formulasi eksplisit ekonomi hijau menunjukkan bahwa integrasi masih berada pada tahap simbolik-konseptual dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi (Xu et al., 2022).

Integrasi pada Dimensi Strategis (Misi dan Arah Kebijakan)

Pada tingkat strategis, RPJMD Kabupaten Banyumas memuat misi pembangunan yang secara langsung berkaitan dengan prinsip keberlanjutan, yaitu “*Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan*” serta “*Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup*”.

Analisis terhadap misi pembangunan dan arah kebijakan RPJMD menunjukkan adanya strategi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, serta peningkatan tata kelola sumber daya alam. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip keberlanjutan telah diterjemahkan dari level visi normatif menjadi kerangka kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, integrasi tersebut masih didominasi oleh kebijakan sektor lingkungan dan belum sepenuhnya menghubungkan sektor ekonomi, investasi, dan pembangunan wilayah dengan prinsip ekonomi hijau secara eksplisit.

Secara teoritis, tahap strategis merupakan fase penting dalam integrasi kebijakan karena menentukan sejauh mana nilai normatif dapat diwujudkan dalam arah tindakan pemerintah. OECD (2019) menekankan bahwa keberhasilan transformasi menuju *Green Economy* memerlukan integrasi lintas sektor dalam strategi pembangunan. Temuan penelitian ini sejalan dengan Aryani dan Nugroho (2024) serta Chaaben et al. (2022) yang menjelaskan bahwa banyak perencanaan pembangunan daerah telah memasukkan isu keberlanjutan pada tingkat strategi, namun masih bersifat sektoral dan belum membentuk paradigma pembangunan yang sistemik. Dengan demikian, integrasi strategis dalam RPJMD Banyumas menunjukkan perkembangan dari komitmen normatif menuju kebijakan konkret, meskipun belum sepenuhnya membangun kerangka ekonomi hijau yang terpadu.

Integrasi pada Dimensi Operasional (Program dan Indikator Kinerja)

Pada tingkat operasional, RPJMD Kabupaten Banyumas memuat berbagai program dan indikator kinerja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, serta pengendalian dampak lingkungan. Keberadaan indikator seperti indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan telah masuk dalam sistem evaluasi pembangunan daerah. Namun indikator yang tersedia masih berfokus pada sektor lingkungan dan belum secara langsung mengintegrasikan dimensi ekonomi seperti efisiensi energi, ekonomi sirkular, atau pengurangan intensitas emisi dalam aktivitas ekonomi daerah. RPJMD memuat berbagai program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pengelolaan Persampahan. Integrasi operasional merupakan indikator paling konkret dalam menilai implementasi ekonomi hijau karena berkaitan langsung dengan mekanisme pengukuran kinerja pembangunan. Xu et al. (2022) menegaskan bahwa indikator terukur menjadi syarat utama transformasi kebijakan menuju pembangunan berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan Antasari (2019), Mubarak (2023), serta Yenita dan Soegiarso (2024) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengembangkan indikator lingkungan, namun integrasi lintas sektor ekonomi masih terbatas. Dengan demikian, integrasi operasional dalam RPJMD Banyumas dapat dikategorikan sebagai integrasi sektoral-terukur, yaitu telah memiliki indikator lingkungan yang jelas tetapi belum membentuk sistem ekonomi hijau yang menyeluruh.

Tabel 2. Tingkat Integrasi *Green Economy* dalam RPJMD Banyumas

Dimensi	Tingkat Integrasi	Justifikasi
Normatif	Tinggi	Prinsip keberlanjutan tercermin dalam visi pembangunan daerah.

Strategis	Sedang	Terdapat arah kebijakan lingkungan, namun integrasi dengan sektor ekonomi belum kuat.
Operasional	Sedang	Program dan indikator lingkungan tersedia, tetapi indikator ekonomi hijau masih terbatas.
Integrasi Lintas Sektor	Rendah	Belum ditemukan keterkaitan sistematis antara target ekonomi, investasi, industri, dan keberlanjutan lingkungan.
Integrasi Keseluruhan	Parsial-Progresif	Prinsip ekonomi hijau telah hadir pada seluruh level dokumen, tetapi belum membentuk kerangka pembangunan hijau yang komprehensif.

Sintesis Integrasi *Green Economy* dalam RPJMD Kabupaten Banyumas

Berdasarkan analisis pada dimensi normatif, strategis, dan operasional, integrasi konsep *Green Economy* dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menunjukkan pola bertahap yang belum sepenuhnya sistemik. Prinsip keberlanjutan telah hadir sebagai orientasi dasar pembangunan, diterjemahkan ke dalam arah kebijakan strategis, serta dioperasionalkan melalui program dan indikator lingkungan. Namun integrasi tersebut masih bersifat parsial karena belum menghubungkan dimensi ekonomi dan lingkungan secara lintas sektor dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu.

Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan daerah berada pada kategori parsial-progresif, yaitu kondisi ketika prinsip keberlanjutan telah mulai diinstitutionalisasi namun belum membentuk sistem kebijakan yang sepenuhnya terintegrasi. Konsistensi temuan dengan penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa tantangan utama pembangunan ekonomi hijau di tingkat daerah terletak pada integrasi lintas sektor dan penguatan indikator yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan secara simultan. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi melalui pendekatan analisis struktural dokumen perencanaan sebagai instrumen evaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam mentransformasikan pembangunan menuju kerangka ekonomi hijau.

Meskipun berbagai program lingkungan telah terakomodasi dalam RPJMD, keterkaitan antara kebijakan ekonomi daerah dengan instrumen ekonomi hijau belum terlihat secara eksplisit. Program pengembangan investasi, UMKM, industri, dan perdagangan masih disusun sebagai sektor tersendiri dan belum disertai indikator yang secara langsung mengukur efisiensi sumber daya, ekonomi sirkular, ataupun penurunan emisi karbon. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi *Green Economy* dalam RPJMD Kabupaten Banyumas telah berkembang pada dimensi lingkungan, namun belum sepenuhnya membentuk kerangka pembangunan ekonomi hijau yang terintegrasi lintas sektor.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi konsep *Green Economy* dalam dokumen

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 melalui analisis pada dimensi normatif, strategis, dan operasional kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ekonomi hijau telah terintegrasi secara bertahap dalam dokumen perencanaan daerah, ditandai dengan keberadaan nilai keberlanjutan pada visi pembangunan, penerjemahan prinsip lingkungan dalam arah kebijakan strategis, serta hadirnya program dan indikator kinerja lingkungan pada tingkat operasional. Namun demikian, integrasi tersebut masih bersifat parsial karena belum sepenuhnya menghubungkan dimensi ekonomi dan lingkungan secara lintas sektor dalam kerangka kebijakan yang sistemik. Temuan ini memperluas kajian pembangunan berkelanjutan pada tingkat pemerintah daerah dengan menunjukkan bahwa analisis struktural dokumen perencanaan dapat digunakan untuk menilai kesiapan transformasi menuju ekonomi hijau sebelum tahap implementasi kebijakan. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis dokumen perencanaan daerah serta membuka peluang pengembangan penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan antara integrasi perencanaan dan implementasi ekonomi hijau pada tingkat daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ammar, Z., Irwan, M., Sapridawati, Y., Diskhamarzaweny, R., Andriani, R., & Yulis, Y. (2024). Ekonomi hijau sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Literatur review. *Khittmah Journal*, 6(1), 1-12.
- Antasari, D. W. (2019). Implementasi *Green Economy* terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 80-88.
- Anwar, M. (2022). *Green Economy* sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1S), 343-356.
- Aryani, Z. U., & Nugroho, H. W. (2024). Perencanaan pembangunan Provinsi Riau dalam kerangka pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi*, 7(1), 1-15.
- Chaaben, N., Elleuch, Z., Hamdi, B., & Kahouli, B. (2022). *Green Economy* performance and sustainable development achievement: Empirical evidence from Saudi Arabia. *Environment, Development and Sustainability*.
- Kristianto, A. H. (2020). Sustainable development goals (SDGs) dalam konsep *Green Economy* untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis ekologi. *Journal Business Economics and Entrepreneurship*, 4(1), 28-38.
- Mubarok, D. (2023). Penerapan *Green Economy* dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Bina Ummat*, 6(2), 31-52.
- OECD. (2019). *Green growth policy review of Indonesia: Implementing green growth*. OECD Publishing.
- Xu, J., Zhao, J., She, S., & Liu, W. (2022). Green growth, natural resources and sustainable development: Evidence from BRICS economies. *Resources Policy*, 79, 103032.
- Yenita, Y. Y., & Soegiarso, R. (2024). The implementation of green construction in IKN development by integrating sustainable triangle concept into sustainable development goals. *Frontiers in Political Science*, 6, 1489034.